

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam kajian hubungan internasional, perkembangan dan bahkan perubahan baik yang terjadi di lingkungan internasional, eksternal maupun internal suatu negara merupakan faktor-faktor signifikan yang perlu diperhatikan oleh para aktor politik internasional.

Penulisan ini bermula dari ketertarikan penulis untuk mengaplikasikan fenomena nuklirisasi di Semenanjung Korea terutama Korea Utara dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan perspektif ilmu hubungan internasional dalam upaya mendeskripsikan perkembangan nuklir di Korea Utara serta upaya-upaya dunia internasional untuk meredam ketegangan di kawasan tersebut.

Salah satu isu internasional yang menonjol dalam dunia internasional saat ini adalah ketegangan baru antara Korea Utara dan Amerika Serikat dikarenakan ketidakmauan atau keengganan Pyongyang mengikuti kemauan pemerintahan Washington tentang penghapusan program senjata nuklirnya. Isu panas inilah yang dikhawatirkan dunia internasional mempengaruhi stabilitas keamanan di Asia bahkan di dunia.

Dalam kajian politik hubungan internasional, perkembangan dan bahkan perubahan baik yang terjadi di lingkungan internasional baik eksternal ataupun internal suatu negara merupakan faktor-faktor signifikan yang perlu diperhatikan oleh para pengambil keputusan atau aktor politik internasional dalam hal ini

negara. Secara teoritis, terdapat korelasi atau hubungan antara perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal dengan perubahan politik luar negeri suatu negara. Lebih jauh, korelasi tersebut akan menghasilkan keputusan atau tindakan dan perilaku politik luar negeri yang sifatnya adaptasi terhadap lingkungannya. Begitu juga apa yang terjadi sekarang ini, ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat merupakan adaptasi dari lingkungan internasional yang terbentuk di kawasan Semenanjung Korea dimana issue nuklirisasi berkembang dikawasan tersebut dan menciptakan suasana tegang diikuti dengan pengkonsentrasian persenjataan atau personil pasukan dari masing-masing negara.

B. Tujuan Penulisan

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini. *Pertama*, untuk mengetahui sebab-sebab Korea Utara tetap mengembangkan program senjata nuklirnya walaupun dalam tekanan banyak pihak. *Kedua* untuk mengetahui gambaran mengenai situasi dan kondisi hubungan Korea Utara – Amerika Serikat pasca perjanjian 6 pihak. Selain itu pada dasarnya juga bertujuan untuk dapat menjelaskan faktor-faktor yang secara tidak langsung menghambat hubungan kedua negara didalam menciptakan lingkungan yang damai.

C. Latar Belakang Masalah

Studi hubungan internasional menunjukkan fenomena yang luas, meliputi interaksi antar anggota komunitas internasional atau perilaku aktor dalam sistem

internasional. Perilaku tersebut bisa berwujud kerja sama, konflik, perang, pembentukan aliansi, dan interaksi dalam organisasi internasional.¹

Semenanjung Korea merupakan kawasan yang potensi konfliknya sangat tinggi seperti kawasan konflik di Timur Tengah, terutama antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan sejarah konflik cukup panjang pasca penjajahan Jepang selama 35 tahun. Konflik serta krisis kesepahaman kerap mewarnai daerah Semenanjung Korea yang menimbulkan ketegangan diantara negara-negara disekitar kawasan tersebut.

keberadaan kekuatan asing yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet yang notabennya negara penghasil senjata modern terbesar dengan kecanggihan teknologi militer yang handal dan memiliki daya ledak tinggi (*high explosive*) seperti senjata rudal, dan senjata nuklir dalam menopang kekuatan tempur pemerintahan kedua negara bekas jajahan Jepang dalam mengatasi permasalahan internal maupun permasalahan eksternal pemerintahan membuat kondisi Semenanjung Korea semakin tegang.

Kepemilikan senjata nuklir suatu negara memang menjadikan perubahan konteks politik internasional menjadi rawan konflik mengingat senjata tersebut memiliki nilai tawar kekuatan untuk menentukan suatu pemerintahan mempengaruhi yang lainnya, dengan kata lain nuklir merupakan instrumen kekuasaan negara yang optimal saat ini. namun keberadaan nuklir dapat memunculkan permasalahan dan ketegangan baru diberbagai belahan dunia termasuk apa yang terjadi di Semenanjung Korea.

¹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisis*. UGM 1994, hal.28.

Keterlibatan Semenanjung Korea dalam masalah senjata nuklir disebabkan masih adanya kecurigaan diantara kedua Korea tentang adanya invasi dari masing-masing negara. Dalam konteks pasca Perang Dunia II, Korea Selatan kemudian meminta jaminan perlindungan dari Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara mencari bantuan dari Cina dan Uni Soviet karena seperti diketahui bahwa Korea secara politis terlepas satu sama lainnya pada tahun 1948 di garis bujur 38°.²

Menyadari bahwa Korea Utara memiliki keuntungan geografis, Korea Selatan kemudian membuat perjanjian dengan Amerika Serikat yang memberi izin kepada Amerika Serikat untuk kemudian menempatkan pasukan dan membangun pangkalan militer di Korea Selatan.³ Dalam konteks Perang Dingin (1989 – 1990) pun demikian Amerika Serikat menempatkan pasukannya di Korea Selatan sebanyak 37.000 dan 100.000 pasukan yang tersebar disekitar kawasan Asia.⁴

Rencana Amerika Serikat meningkatkan kekuatan tempur tentaranya di Korea Selatan pasca Perang Dingin telah merusak sama sekali ketentuan persetujuan penghentian Perang Korea (Juli 1953) tentang penghentian pengiriman tambahan perlengkapan perang dari luar wilayah.⁵ Hal tersebut membuktikan strategi Amerika Serikat terhadap Korea Utara mulai berubah dari pembendungan menjadi serangan prefentif dan Amerika Serikat sudah memasuki tahap akhir persiapan melancarkan serangan, selain itu Amerika Serikat telah

² Ichlasul Amal, *Masyarakat, Politik dan Pemerintahan Korea*. Gama Press, hal. 116.

³ Dian Wirengjurit, *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir. Pengertian, Sejarah dan Perkembangannya*. PT ALUMNI, Bandung 2002, hal 355-356.

⁴ <http://kompas.com/utama/news/0206/29/103423.htm>

⁵ www.cri.com (GMT+08.00 2003-12-17 16:03:52)

mengabaikan ketentuan persetujuan penghentian perang tentang larangan melakukan blokade dalam bentuk apapun terhadap Korea Utara. Namun Amerika Serikat tetap melakukan dan membujuk pemerintahan Jepang untuk melakukan blokade terhadap Korea Utara dari udara dan laut serta melakukan penerbangan pengintaian di udara Semenanjung Korea lebih dari 200 kali untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap sasaran strategis di Korea Utara.⁶

Sejalan dengan meningkatnya suhu politik dalam masa Perang Dingin dan untuk menangkal adanya ancaman invasi dari Korea Utara, Amerika Serikat kemudian mulai menggelar senjata nuklirnya di Korea Selatan, yang dilain pihak telah mendorong Korea Utara untuk mulai mengembangkan sendiri program nuklirnya.

Program energi nuklir Korea Utara mulai dikembangkan pada tahun 1940-an yang merupakan hasil proyek riset kerjasama dengan Cina dan Uni Soviet dan dimulai dengan sungguh-sungguh pada awal 1960-an di Yongbyon. Program energi nuklir ini dimanfaatkan oleh pemerintahan Korea Utara sebagai sumber pasokan pembangkit tenaga listrik yang berkemampuan 30.000 Kw. Pihak Amerika Serikat menduga dan memantau terus kegiatan nuklir Korea Utara tersebut melalui satelit dan mengidentifikasi fasilitas reaktor nuklir di Yongbyon merupakan langkah awal dari rencana pembuatan ataupun pengembangan program senjata nuklir Korea Utara.⁷

Pada 1994 akhirnya Korea Utara melakukan perundingan dengan Amerika Serikat berkaitan kecurigaan Amerika Serikat atas reaktor nuklir Korea

⁶ *Ibid.*

⁷ Yong Sun Song. *The Korea Nuclear Issue. Korea and World Affairs* xv, no.3 Fall 199, hal 476.

Utara yang dijalankan digunakan untuk langkah awal pembuatan senjata nuklir ataupun rudal balistik. Korea Utara menandatangani kerangka kesepakatan (*Frame Agreement*) penghentian program nuklir Korea Utara, dengan kesepakatan bahwa Amerika Serikat dan negara koalisinya bersedia mensupply energi lain atau pasokan bahan bakar minyak guna menjalankan reaktor nuklir air ringan dan untuk memenuhi pasokan kebutuhan rakyat Korea Utara.

Kerangka kesepakatan tersebut ternyata tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Pada 16 Oktober 2002 Amerika menuduh Korea Utara masih menjalankan reaktor nuklir yang lainnya. Korea Utara bahkan menolak dan mengusir petugas dari IAEA 31 Desember 2002 yang ingin memeriksa reaktor nuklir di negaranya yang pada 3 Juni 1994 telah keluar dari anggota IAEA⁸. Pada 9 Januari 2003, Korea Utara menarik diri dari perjanjian kerangka kesepakatan Non-Proliferasi Treaty (NPT) yang menghasilkan kerangka kesepakatan tersebut yang sebelumnya juga telah keluar dari keanggotaannya pada 12 Maret 1993, Hal ini mengejutkan negara-negara di Semenanjung Korea.

Seiring dengan kecurigaan Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir di Korea Utara, Amerika Serikat terus melakukan kegiatan prefentif dengan menambah persenjataannya di daerah Asia yakni Jepang dan Korea Selatan, tercatat dalam laporannya "Natural Resources Defense Council" berdasarkan analisa pemantauan lewat satelit maupun narasumber lainnya,

⁸ IAEA (International Atomic Energy Agency) merupakan badan otonom, tetapi berada didalam sistem PBB sebagai suatu specialized agency dan menyampaikan laporan tahunannya kepada SMU PBB. IAEA yang bermarkas di Wina, Austria, merupakan forum utama antar pemerintah bagi kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan dibidang nuklir. Salah satu fungsi utamanya adalah menerapkan full-scope safe guards untuk menjamin bahwa material dan peralatan nuklir benar-benar dimaksudkan untuk tujuan damai dan tidak dialihkan untuk keperluan militer. Sampai tanggal 28 September 1994, IAEA beranggotakan 131 negara.

organisasi tersebut menyimpulkan bahwa Amerika Serikat masih memiliki 480 senjata nuklir taktis di Eropa serta tersebar di Korea Selatan dan Jepang yang memiliki perjanjian khusus mengenai keberadaan militer dan kekuatan tempurnya di wilayah Asia Timur Laut tersebut.⁹

Dalam perkembangan kerangka kesepakatan, Amerika Serikat terus melakukan sikap dan tindakan yang cukup provokatif. Amerika Serikat menekan bahwa Korea Utara harus menghentikan dan menghapuskan program nuklirnya secara sepihak dan Amerika Serikat mulai membujuk negara-negara koalisinya seperti Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan peralatan tempurnya dan memblokir seluruh kawasan Semenanjung Korea baik darat, laut maupun udara, untuk menghambat secara keseluruhan Korea Utara mengekspor senjata nuklir maupun rudal ke luar negeri.

Amerika Serikat menduga Korea Utara telah mengekspor rudal scudnya keluar negeri karena departemen luar negeri Amerika Serikat bersama angkatan laut Spanyol telah berhasil menangkap dan menginvestigasi pengapalan peluru kendali (rudal Scud) Korea Utara di perairan Laut Arab, padahal menurut pengajar hukum internasional Universitas Nasional Seoul, Chung Inseop Korea Utara tidak bergabung dengan rezim pengawasan teknologi rudal (MCTR) yang melarang keras ekspor rudal.¹⁰

Terkait dengan pengeksporan rudal tersebut, Korea Utara yang pada tahun 1990-an telah mengalami krisis ekonomi dan krisis energi dimana tercatat perekonomian Korea Utara minus 5 % – 6%. GNP turun dari 20 Milyar dolar

⁹ www2.rnw.nl/rnw/id/topikhangat/arsipaktua/masalahglobal/senjata_nuklir050211

¹⁰ <http://kompas.com/kompas-cetak/0212/12/ln/44726.htm>

menjadi hanya 10 dolar dan konsumsi minyak Korea Utara turun secara drastis dari 2.520.000 ton menjadi 1.520.000 ton di tahun 1992,¹¹ diduga mencoba menutupi kekurangan finansial tersebut dengan mengekspor senjata-senjata beratnya atau menjualnya.

Dengan tersebarnya dugaan Korea Utara telah mengekspor beberapa senjata beratnya ke luar negeri, seperti Rodong I yang memiliki jarak tembak maksimal 1.000 – 1.300 km yang mampu menjangkau semua sasaran di Jepang yang dikembangkan dari rudal scud B milik Uni Soviet dan juga rudal Taepodong, membuat situasi ketegangan di Semenanjung Korea semakin buruk. Ditambah Korea Utara pada 2002 setelah beberapa utusan Amerika Serikat datang untuk melihat dan memastikan bahwa negara stalinis ini melakukan pengembangan senjata nuklir, dengan tegas mengatakan bahwa negaranya telah memiliki senjata nuklir dan hampir menyelesaikan pengolahan kembali 8000 batang bahan bakar nuklir serta mengaku berusaha memperluas program produksi nuklirnya.¹²

Kedahsyatan senjata pemusnah massal atau nuklir Korea Utara tersebut diduga melampaui apa yang dipunyai Irak dimana Irak pada tahun sebelumnya dicurigai dengan hal yang sama hingga Amerika melakukan strategi *pre-emptive strike*, doktrin yang berasumsi “lebih baik mendahului ketimbang didahului”.¹³ Program “*plutonium-based nuclear*” di Yongbyon dan “*highly-enriched-uranium*” (HEU) nuclear program Korea Utara jelas menimbulkan kekhawatiran

¹¹ Andrew Mack, *Nuclear Crises on The Korean Peninsula*, dalam *Asian Survey*, Vol XXXIII, No. 4, April 1993, hal. 301.

¹² <http://kompas.com/kompas-cetak/0306/03/in/346453.htm>

¹³ <http://kompas.com/kompas-cetak/0305/12/opini/300231.htm>

dan ancaman bagi Amerika Serikat atas posisi strategisnya di Asia Pasifik dan Timur Jauh, bukan hanya karena daya musnahnya tetapi kemungkinan teknologi nuklir Korea Utara pindah tangan ke negara bengal (*rouge-states*) lain atau jatuh ditangan organisasi terorisme.¹⁴ Kekhawatiran Amerika Serikat akan senjata nuklir Korea Utara tersebut, dirasakan perlu penyelesaian dan pemecahan permasalahan tersebut secara menyeluruh.

Kemudian sejumlah perundingan pun dilakukan dan digelar, diantaranya perundingan 6 pihak yang hingga sekarang akan memasuki perundingan ke-4 guna menekan Korea Utara melepaskan dan menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya namun perundingan tersebut belum bisa terlaksana. Perundingan yang diikuti oleh negara-negara yang berdekatan dengan Semenanjung Korea diantaranya Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, China, Jepang dan Amerika Serikat untuk meredam ketegangan yang berawal dari pasca Perang Korea dan membawa kepada krisis nuklir mengalami satu langkah terang. Namun hingga saat ini perundingan tersebut bisa dikatakan belum menghasilkan suatu kesepakatan baru yang mampu menyelesaikan ketegangan yang terjadi dikarenakan sikap politik bermusuhan Amerika Serikat yang tidak kooperatif. Amerika Serikat meminta Korea Utara menghentikan seluruh program senjata nuklirnya tanpa diikuti tindakan Amerika untuk melakukan hal yang sama.

Perundingan 6 pihak yang diupayakan hingga kini tidak kunjung membawa hasil dan bahkan cenderung muncul persoalan baru yang jauh dari nilai-nilai perundingan. Seperti gencarnya Amerika Serikat dalam menyerukan

¹⁴ *Ibid.*

penghentian program pengembangan senjata nuklir di Korea Utara dengan melakukan perebutan opini publik ataupun pembunuhan karakter suatu negara seperti kasus penyerangan terhadap Irak dengan meminta dukungan negara-negara di dunia bahwa Korea Utara harus menghentikan program senjata nuklirnya mengingat keamanan dunia. Padahal pada perundingan 6 pihak I (27 – 29 Agustus 2003) hingga III (23 – 26 Juni 2004) telah menghasilkan beberapa langkah awal dan upaya bagaimana Korea Utara dan Amerika Serikat harus bertindak dalam perundingan tersebut seperti Korea Utara telah bersedia seperti apa yang diungkapkan oleh kepala delegasi Tiongkok mengatakan bahwa pihak Korea Utara bersedia secara transparan melepaskan semua program bersangkutan mengenai senjata nuklir, dan menekankan pembekuan instalasi nuklir yang merupakan tahap pertama membatalkan program nuklir serta bersedia menerima pemeriksaan atas instalasi keberadaan nuklir menghentikan program senjata nuklirnya.¹⁵ Tetapi kenyataannya hingga kini Korea Utara masih saja melakukan pengembangan senjata nuklir tersebut.

D. Pokok Permasalahan

Persoalan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah *Mengapa Korea Utara tetap mempertahankan program pengembangan senjata nuklirnya walaupun telah menyepakati proses penghentian program nuklir berdasarkan perundingan 6 pihak I – III ?*

¹⁵ <http://id.chinabroadcast.cn/1/> pada 2004/06/26 (GMT+08:00) 15:33:59

E. Kerangka Dasar Teori

Teori dipergunakan guna membantu kita dalam menentukan tujuan serta arah penelitian dan dalam memilih konsep yang tepat untuk membentuk suatu hipotesis. Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai suatu hubungan sebab-akibat atau adanya suatu korelasi positif antara gejala-gejala yang diteliti dari sesuatu/beberapa faktor tertentu. Suatu hal yang perlu diingat, bahwa teori bukan merupakan pengetahuan sudah pasti tetapi harus dianggap sebagai petunjuk yang hipotesis.¹⁶ Untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan pengembangan senjata nuklir Korea Utara terhadap Amerika Serikat, penulis akan menggunakan salah satu teori dan konsep ilmu hubungan internasional yakni :

1. Teori Balance of Power (Perimbangan kekuasaan)

Teori ini telah dikenal paling tidak secara implisit di India dan Yunani kuno, walupun tidak ditonjolkan secara formal, teori ini merupakan teori tradisional yang paling populer dikalangan pengkaji dan praktisi hubungan internasional. Teori perimbangan kekuasaan sering dinyatakan sebagai satu-satunya cara memelihara perdamaian melalui perimbangan kekuasaan secara hati-hati. Karena teori ini tidak hanya mengandung makna kemampuan militer dan penangkalan, tetapi juga keseluruhan struktur kekuasaan dan pengaruh yang mengatur hubungan antar negara. Oleh karena itu, perimbangan kekuasaan tidak semata-mata menyangkut kemampuan suatu negara mengancam tetangganya atau

¹⁶ Melly G. Tan, *Masalah-Masalah Perencanaan Penelitian, ... dalam Koentjaraningrat, (ed.), Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1983, hal. 37.

mendesak untuk tidak melaksanakan rencana kebijakan. Perimbangan kekuasaan mencakup semua kemampuan politik negara-negara baik bersifat paksaan atau bujukan yang mempertahankan perimbangan konflik tanpa perang.

Menurut Ernst B. Haas *balance of power* mengandung arti yaitu distribusi kekuasaan, suatu proses ekuilibrium atau penyeimbangan, hegemoni atau pengejaran hegemoni, stabilitas dan perdamaian dalam suatu gabungan kekuasaan, instabilitas dan perang, power politics pada umumnya, suatu hukum universal sejarah, suatu sistem dan pedoman bagi pembuat-pembuat kebijakan.¹⁷

Bolingbroke, Gentz, Metternich dan Castlereagh mengatakan, *balance of power* digunakan untuk (1) mencegah timbulnya suatu hegemoni universal; (2) memelihara elemen-elemen pokok dalam sistem dan sistem itu sendiri; (3) menjamin stabilitas dan keamanan bersama dalam sistem internasional; (4) memperkuat dan memperpanjang perdamaian dengan menghindari perang yaitu menghadapi agressor dengan kemungkinan bahwa politik eksplanasi akan berhadapan dengan formasi koalisi tandingan.¹⁸

Adapun metode-metode dan teknik-teknik pemeliharaan atau pemulihan keseimbangannya yakni : (1) politik memecah dan menguasai (untuk mengurangi bobot pihak yang lebih berat); (2) kompensasi teritorial setelah selesainya perang; (3) menciptakan daerah-daerah pengaruh; (4) pembentukan aliansi-aliansi (5) menciptakan daerah-daerah bebas pengaruh; (6) intervensi; (7) percaturan diplomatik; (8) penyelesaian pertikaian secara hukum dan damai' (9)

¹⁷ Ernst B. Haas, The Balance Of Power: Prescription, Concept or Propaganda? *World Politics*, V (July 1953), 442-477.

¹⁸ Harwanto Dahlan, terjemahan. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. UMY 1996, hal. 33.

pengurangan persenjataan; (10) kompetisi atau perlombaan persenjataan; (11) perang itu sendiri.¹⁹

Dalam Krisisi nuklir Korea Utara, yang menyeret negara-negara di Semenanjung Korea berkekuatan pertahanan dan keamanan yang kuat, dimana senjata digunakan sebagai alat untuk memaksakan kepentingan, menjadikan kompetisi atau perlombaan persenjataan sebagai langkah yang diambil Korea Utara untuk memelihara perimbangan kekuatan terhadap negara-negara disekitarnya terutama amerika serikat bersama aliansinya di Semenanjung Korea. Korea Utara berupaya dengan program nuklinya mampu mengimbangi perlengkapan persenjataan yang dimiliki negaranya bersaing dengan kekuatan yang dimiliki negara-negara di Semenanjung Korea seperti Korea Selatan dan Jepang agar kedaulatan negaranya, mengingat senjata nuklir memiliki daya ledak atau daya musnahnya sangat besar. Sehingga dengan berlomba memperlengkapi negaranya dengan senjata pemusnah masal, korea utara berharap bahwa negaranya tidak dapat diganggu atau diusik kedaulatan negaranya seperti yang terjadi terhadap Irak. Artinya program pengembangan senjata nuklir Korea Utara merupakan metode Korea Utara mencapai ataupun memelihara keseimbangan kekuatan atas meningkatnya kekuatan militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea akhir-akhir ini yang kian menunjukkan keberadaannya untuk melakukan invasi terhadap Korea Utara.

Dalam hubungan internasional, kemungkinan konflik selalu ada dan kekuasaan pun demikian sehingga tujuan suatu keseimbangan bukan untuk

¹⁹ *Ibid.*

menghapuskan kekuasaan tetapi untuk mengawasi dan mengaturnya bagi tujuan perdamaian. Atas dasar-dasar tersebut, perimbangan kekuasaan dapat disajikan sebagai konsep analitis untuk mengkaji pengaruh-pengaruh langsung dari keseimbangan dan ketidakseimbangan bagi politik dunia serta memperkirakan akibat-akibat dari pergeseran kekuasaan. Perbedaan antara kekuasaan dan potensi kekuasaan ini adalah penting dalam konsep perimbangan kekuasaan. Banyak negara mempunyai potensi kekuasaan yang besar tetapi sedikit saja pengaruhnya terhadap perimbangan regional atau perimbangan dunia. Jadi perimbangan kekuasaan harus memperhitungkan tingkat-tingkat kesiapan kekuasaan. Memiliki sumber-sumber kekuasaan yang memadai berarti memiliki potensi kekuasaan yang nyata. Dengan memiliki kekuasaan nyata, suatu negara dimungkinkan menjadi aktor utama. Status ini memaksa peserta/negara lainnya untuk memperhitungkan relativitas kekuasaan, kemungkinan pembentukan koalisi ketat, redistribusi pengaruh, atau kemajuan-kemajuan berarti dalam bidang teknologi secara sepihak.

Dalam kaitannya dengan relativitas kekuasaan maka Korea Utara melakukan cara-cara seperti melakukan perang preventif yang mengandung pengertian perimbangan kekuasaan yang sama. Ini termasuk jenis serangan pilihan yang dilakukan untuk melumpuhkan negara musuh sebelum negara itu memiliki kekuatan yang efektif.²⁰ Artinya Korea Utara menganggap dengan menegaskan bahwa negaranya kini telah berhasil mengembangkan reaktor nuklirnya yang menghasilkan plutonium dan dikembangkan menjadi senjata

²⁰ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatahan Dunia 2*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 40.

Menurut *K.J. Holsti*, konsep deterrence atau penangkalan merupakan konsep yang digunakan oleh para perumus kebijakan yang berusaha mencegah tindakan tertentu dari negara lawan dengan melakukan ancaman pembalasan militer. Dan merupakan salah satu sarana untuk mempengaruhi sikap, kebijaksanaan dan tindakan negara lain yang patut dipertimbangkan.

Penangkalan menurut *Thomas Schelling dan Morton H. Halperin* merupakan kemampuan suatu negara menggunakan ancaman kekuatan militer untuk mencegah negara lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan meyakinkannya bahwa biaya yang harus ditebusnya jauh lebih besar dibanding peluang keuntungan politik yang dapat diraihinya.²¹

Strategi penangkalan mencakup hukuman atau penolakan untuk mempercayai pihak lain. Peningkatan kemampuan militer, pengembangan pers, senjata canggih dengan daya hancur masal, pembentukan aliansi dan ancaman melakukan tindakan adalah beberapa sarana yang biasa dipergunakan dalam menjalankan kebijakan penangkalan.²²

Tetapi karena anarkhisme dalam masyarakat internasional dan semakin besarnya kemungkinan terjadi konflik, penangkalan lebih sering dikaitkan dengan konotasi militer dengan kata lain konsep ini merupakan doktrin militer yang dirancang untuk mengendalikan atau menahan penggunaan senjata (nuklir) oleh pihak musuh untuk tujuan-tujuan militer.²³

²¹ Thomas & Morton dalam Kusnanto Anggoro, *Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Pasca Perang Dingin dalam Perkembangan Studi HI dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta 1996, hal. 72

²² B.N. Marbun, SH, *Kamus Politik*, Jakarta, PT Midas Surya Grafindo, 1996, hal 145.

²³ *Ibid.*

nuklir, dimaksudkan pernyataan tersebut mampu melumpuhkan kekuatan balasan Amerika Serikat atas apa yang akan dilakukan bersama negara koalisinya memusuhi Korea Utara sebagai poros kejahatan setelah Irak.

Dalam kajian teori hubungan internasional, perkembangan kekuasaan dibagi menjadi 3 jenis perkembangan kekuasaan yaitu :

1. Perkembangan kekuasaan bipolar, dimana dunia internasional dirubah menjadi 2 konstelasi politik sebagai sentral kekuasaan.
2. Perkembangan kekuasaan multipolar yang melibatkan beberapa negara melakukan persamaan kekuatan atau kekuasaan.
3. Perkembangan kekuasaan regional.

Dalam ketegangan Korea Utara dan Amerika Serikat, peningkatan kemampuan dari masing-masing negara merupakan wujud dari pertimbangan kekuasaan regional karena pada tingkat tinggi, kedua negara memiliki pengaruh terhadap negara-negara sekitarnya yang memiliki kepentingan yang sama di sana. Konflik Korea Utara pada dasarnya merupakan konflik di mana terjadi perebutan pengaruh atas suatu kekuatan besar di wilayah tersebut.

2. Konsep Deterrence (Penangkalan)

Dalam pengertian yang paling sederhana, penangkalan dapat dianggap sebagai kebijakan yang diambil oleh sebuah atau sekelompok negara melalui penggunaan ancaman balasan untuk mencegah negara lain menjalankan kebijakan yang tidak dikehendaki.

Hal itu bukan berarti sumber daya non militer tidak memainkan peranan penting dalam konseptualisasi penangkalan. Misalnya pernyataan politik, sering juga efektif untuk mempengaruhi kehendak pihak lawan. Oleh sebab itu, konsep penangkalan dapat diartikan sebagai ancaman penggunaan kekuatan dalam suatu serangan balasan yang dapat menimbulkan suatu kerusakan besar sehingga pihak lawan membatalkan "kehendaknya untuk terlebih dahulu melakukan serangan".

Penangkalan sering dianggap sebagai satu-satunya cara atau mekanisme untuk mencegah terjadinya perang antar negara. Akibatnya, neraca penangkalan tidak dapat ditimbang semata-mata dari perspektif suatu negara: tetapi ia memerlukan persepsi sistemik atau terstruktur yang harus memperhitungkan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh negara lain.²⁴ Sehingga hal ini menjelaskan tentang kehandalan dan kemampuan sistem penangkalan serta hubungan atau komunikasi antar pihak yang sedang terjerat dalam situasi konflik.

Kehandalan dan kemampuan suatu sistem penangkalan ditentukan tidak hanya oleh dimensi jumlah (kuantitatif) tetapi juga kualitatif. Kedua-duanya menentukan perimbangan kekuatan yang sesungguhnya, sehingga hal ini menjelaskan mengapa perimbangan kekuatan antara dua kekuatan atau lebih sering dipersoalkan dari segi jumlah pasukan dan persenjataan daripada kesiagaan tempur dan mobilitas pasukan.

Konsep penangkalan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah atau sekelompok negara untuk mencegah negara lain menjalankan kebijaksanaan yang tidak dikehendaki. Penangkalan mencakup strategi ancaman hukuman atau

²⁴ K.J Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, terjemahan M. Tahir Azhary, edisi keempat jilid2 hal 39.

penolakan untuk mempercayai pihak lain karena resiko tindakan antisipasi akan tidak terkirakan. Sarana yang dipergunakan untuk menjalankan kebijaksanaan penangkalan adalah peningkatan kapabilitas militer secara umum, mengembangkan persenjataan super dengan daya hancur masal, membentuk aliansi dan ancaman melakukan tindakan balasan. Agar menjadi efektif ancaman penangkalan harus benar-benar dapat dipercaya oleh pihak lain yang dijadikan sasaran.²⁵

Konsep penangkalan berkembang pesat sejak pertengahan dasawarsa 1960-an khususnya setelah kedua negara adikuasa saat itu membangun sistem pertahanan anti rudal. Memang, sesungguhnya tidak terlalu sukar mengatasi kompetisi senjata nuklir antara kedua negara adikuasa tersebut begitu juga apa yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan pemerintahan Korea Utara dengan gamblang dan jelas bahwa dirinya mengembangkan senjata nuklir jika persoalan “kepastian saling menghancurkan” dan “kelangsungan hidup dalam perang nuklir” yang berturut-turut dianut oleh negara-negara yang memiliki potensi militer yang besar dan berteknologi tinggi itu mau menghentikan program nuklirnya tersebut mengingat keamanan dunia dan perdamaian seluruh bangsa.

Karena betapa pun terdapat perbedaan teoritis, strategi itu bertemu pada asumsi penangkalan yang tetap mengandalkan serangan balasan. Oleh karena itu, jika kedua belah pihak dapat menghilangkan saling curiga mengenai intensitas serangan pertama pihak lawan, maka perang nuklir akan dapat dicegah. Perbedaan latar belakang sejarah, sistem sosial-ekonomi dan ideologi, maupun

²⁵ Jack C. Plano, Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, terjemahan Wawan Juanda, Putra A Bardin, 1999, hal. 145.

karakter geografis juga merupakan faktor penting yang mengakibatkan negara-negara itu saling menuduh bahwa serangan pertama akan berasal dari pihak lawan.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang didasrkan pada kerangka dasar pemikiran, maka akan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan senjata nuklir Korea Utara lebih disebabkan karena :

1. Strategi penangkalan Korea Utara terhadap resiko tindakan *pre-emptive strike* Amerika Serikat setelah Amerika Serikat menyerang Afghanistan dan Irak.
2. Sebagai perimbangan kekuatan terhadap kekuatan militer Amerika Serikat yang terus melakukan penambahan ataupun alih teknologi dan konsentrasi kekuatan militer, khususnya di Korea Selatan dan Jepang.

G. Batasan dan Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi dalam hal waktu dan jangkauan penelitian serta lokasi penelitian itu sendiri guna menambah materi ataupun sumber baik yang sifatnya informatif maupun fakta.

Adapun jangkauan peneletian ini dibatasi mulai dari proses perundingan 6 pihak I – III hingga pra perundingan perundingan 6 pihak IV mengenai penghentian pengembangan senjata nuklir Korea Utara

Waktu penelitian yang dibutuhkan bagi penelitian ini oleh penulis adalah \pm 6 bulan dan bahkan mungkin lebih terhitung sejak bulan Maret 2005 dan direncanakan selesai bulan Agustus 2005. Untuk lokasi penelitian, penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi untuk memperoleh data maupun informasi yang akan digunakan dalam proses penyusunan skripsi, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, intisari, dokumen) dan “diproses” sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih-tulis). Disamping itu, penulis juga menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur untuk memperoleh sumber maupun pedoman dalam mencapai data yang akurat dan bermanfaat bagi penelitian, serta berbagai sumber sekunder yang diperlukan sebagai informasi, yaitu bahan-bahan yang bersifat dokumenter (dokumen tertulis) seperti : laporan, buku, majalah, jurnal, artikel yang memuat pernyataan politik publik atau perseorangan, serta publikasi dari lembaga-lembaga yang bertugas mencatat berbagai aktivitas di luar negeri (meliputi surat kabar, internet hingga pendapat para ahli yang pengetauan dan pemahamannya sudah diakui).

Data disajikan secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah dimana data tersebut dikelompokkan dalam bab-bab tertentu dan selanjutnya dibagi atas beberapa sub-bab yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi atas beberapa bab dimana setiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Secara singkat bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Yang berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, batasan dan jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan. Bab ini adalah gambaran menyeluruh tentang skripsi ini.

Bab II, Sejarah kebijakan Nuklir Korea Utara. Membahas tentang kondisi umum Korea Utara secara keseluruhan yang terdiri dari keadaan fisik wilayah dan penduduk, teknologi dan masalah security defense.

Bab III, Kebijakan Nuklir Korea Utara Pasca Perundingan 6 Pihak. Pada bab ini menjelaskan kurang lebih proses penghentian nuklir Korea Utara pra perundingan 6 pihak dan pasca perundingan 6 pihak I – III di Semenanjung Korea .

Bab IV, Faktor-Faktor dan Tujuan Pengembangan Nuklir Korea Utara Pasca Perundingan 6 Pihak I - III. Membahas posisi Korea Utara terhadap negara-negara yang berdekatan dengan Semenanjung Korea seperti China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, serta Amerika Serikat dan mengetahui alasan Korea Utara tetap mengembangkan senjata nuklirnya sehingga dari sini dapat menunjukkan Korelasi atau skenario politis antar kepentingan Korea Utara dengan kepentingan Amerika Serikat yang menimbulkan ketegangan hingga sekarang.